

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena perubahan iklim merupakan isu internasional yang muncul sejak tahun 1800an dan masih *Exist* sampai sekarang. Hal ini disebabkan oleh naiknya jumlah penduduk dan aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya hingga mampu menciptakan revolusi industri yang pertama (Alhadi, 2018). Peningkatan sarana transportasi dan jumlah industri secara global diikuti oleh peningkatan penggunaan bahan bakar dari fosil, dan ini akan meningkatkan gas karbondioksida (CO₂) di atmosfer. Seperti diketahui gas CO₂ adalah salah satu komponen utama gas rumah kaca yang diperkirakan setiap tahunnya melepaskan sekitar 18,35 miliar ton CO₂ (Sulistiyono, 2012).

Ketika atmosfer bumi semakin kaya akan gas CO₂ ini maka semakin menjadi insulator yang menahan lebih banyak panas dari matahari yang dipancarkan ke bumi sehingga menyebabkan pemanasan global. komponen utama dari pemanasan global ini adalah pembakaran dari energi fosil seperti, batu bara, gas, dan minyak bumi yang melepaskan gas-gas CO₂ secara dominan ke atmosfer. Pemanasan global sudah menjadi isu internasional karena memiliki dampak yang berbahaya bagi makhluk hidup diantaranya seperti, suhu bumi meningkat, peningkatan permukaan air laut, perubahan iklim bumi, dan gangguan ekologis (Sulistiyono, 2012).

Masalah ini tentu tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan harus dengan kerjasama multilateral yang diwujudkan dalam bentuk konvensi, traktat atau perjanjian internasional, karena semua negara didunia turut menyumbang emisi gas CO₂ ke atmosfer. Dalam perjalanannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai organisasi internasional yang

mempunyai visi “Menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia” merespon masalah ini dengan mengagendakan suatu Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro, Brazil. Melalui konferensi tersebut terbentuklah UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang bertujuan untuk menstabilkan efek gas rumah kaca yang menjadi pemicu pemanasan global. Selanjutnya UNFCCC membentuk badan untuk pertemuan tahunan, yaitu COP (*Conference of the Party*). COP memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi internasional dalam mewujudkan tujuan utama konvensi, yaitu melawan perubahan iklim. (Rusbiantoro, 2008).

Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 1992 hingga tahun 2015 UNFCCC telah mengadakan pertemuan COP sebanyak 21 (dua puluh satu) kali. COP ke-21 dilaksanakan di Paris pada tahun 2015, dan menghasilkan kesepakatan untuk menghadapi perubahan iklim, hasil ini disebut dengan *Paris Agreement*. Upaya-upaya internasional dalam melawan perubahan iklim inilah yang kemudian melahirkan rezim iklim internasional.

Paris Agreement memiliki tujuan untuk menahan laju peningkatan temperature global di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi. *Paris Agreement* diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi setiap negara anggota terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim (Ridha, 2016).

Amerika Serikat yang dipimpin oleh Barack Obama pada tahun 2015, merupakan salah satu negara industri penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, menyetujui dan meratifikasi hasil konferensi tersebut.

Keikutsertaan Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* membuat banyak negara percaya perjanjian ini sebagai harapan baru setelah berlalunya keefektivitasan Protokol Kyoto. Sebelumnya Barack Obama memang dinilai sebagai pemimpin Amerika Serikat yang menaruh perhatian pada isu perubahan iklim, dapat dilihat dari kebijakannya yang disebut dengan CAP (*Climate Action Plan*). Kebijakan ini merupakan upaya untuk mengurangi emisi karbon yang dominan karena akibat dari penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil baik untuk konsumsi transportasi, industri dan lainnya, oleh karena itu CAP bertujuan untuk menahan laju penggunaan energi fosil dan meningkatkan sumber daya energi terbarukan serta ramah lingkungan. Selama berjalannya CAP, emisi gas rumah kaca Amerika Serikat pada tahun 2014 menurun sebesar 9,4% (EPA, 2016), hal ini diikuti dengan menurunnya produksi batu bara Amerika Serikat, dan penurunan batu bara ini diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan energi terbarukan. Bahkan untuk pertama kalinya, pada tahun 2016 listrik tenaga angin menjadi sumber kapasitas nomor satu di Amerika Serikat dengan total investasi sebanyak 25 miliar. Tidak hanya itu, dalam CAP juga menetapkan aturan untuk pengurangan limbah energi rumah tangga, perkantoran, pabrik dan membangun infrastruktur yang aman bagi lingkungan, serta menetapkan standar tertentu untuk bahan bakar kendaraan.

Upaya mantan Presiden Barack Obama, mulai dari keikutsertaannya dalam *Paris Agreement* dan kebijakan CAP (*Climate Action Plan*) benar-benar menunjukkan optimismenya dalam melawan perubahan iklim.

Namun, upaya Barack Obama untuk membawa Amerika Serikat melawan perubahan iklim menuju ketidakpastian. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat pada tahun 2017 justru mengubah arah kebijakan Amerika Serikat dalam merespon perubahan iklim. Donald Trump mengganti CAP (*Climate Action Plan*) menjadi AFEP (*America First Energy*

Plan). Hingga pada 1 Juni 2017, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mundur dari *Paris Agreement* dan segera berhenti menerapkan perjanjian tersebut, termasuk menerapkan NDC (*Nationally Determined Contribution*) atau kontribusi yang ditentukan berdasarkan kemampuan nasionalnya.

AFEP (*America First Energy Plan*) merupakan kebijakan yang berisikan tentang kemandirian energi bagi Amerika Serikat. Didalamnya berisi peraturan-peraturan yang mendorong untuk meningkatkan kembali industri batu bara, minyak, dan gas alam. Di dalam AFEP sebenarnya aturan tentang energi terbaru tetap berjalan, tapi peraturan yang berbasis perubahan iklim yang dapat menekan produksi energi fosil dihapus dan diubah. Selama masa kampanye kepresidenan, Donald Trump menyatakan bahwa dia akan menerapkan rencana energi '*America First*' yang memungkinkan AS menjadi pemimpin dominan dunia internasional dalam produksi energi. Tujuan keseluruhan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan produksi energi dan menjadikan sektor energi yang diatur secara ketat dan lebih kompetitif baik secara global atau luar negeri (Scott Anderson, 2017).

Kebijakan ini bersifat domestik untuk Amerika Serikat, namun dalam perjalanannya kebijakan ini memberikan pengaruh terhadap keputusan dan arah ekonomi politik Amerika Serikat dalam lingkup internasional. Seperti menjadi eksportir minyak mentah untuk pertama kalinya dalam 75 tahun sejarah Amerika Serikat, dan menarik diri dari *Paris Agreement*.

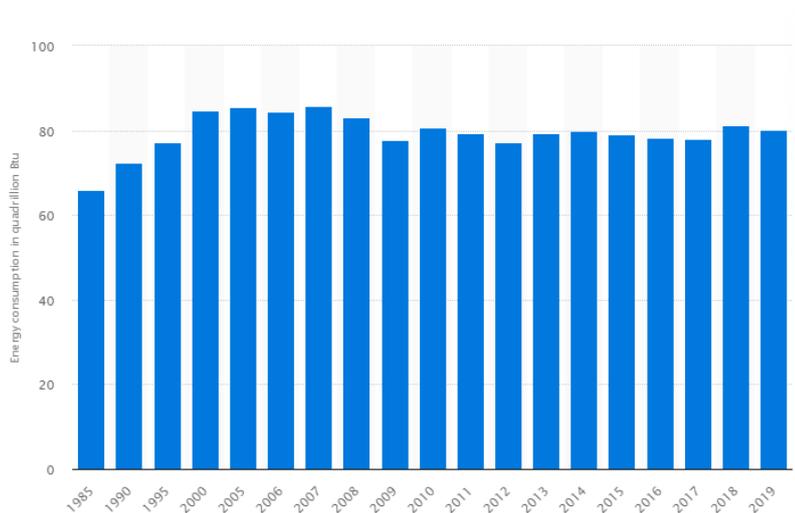
Presiden Trump memiliki tiga tujuan utama dalam kebijakan ini; Kemandirian Energi, Penciptaan lapangan kerja, dan membatalkan *Climate Action Plan*. Menurut Trump kemandirian energi tidak hanya berarti mengurangi ketergantungan pada energi asing tetapi juga dominasi energi bagi Amerika Serikat, sehingga ekspor dapat ditingkatkan. Tujuan kedua dari kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru di

bidang yang terkait dengan energi melalui deregulasi. Terakhir, Donald Trump berjanji untuk “melestarikan cadangan dan sumber daya alam kita” sebagai bagian dari revolusi energi baru. (Vakhshouri, 2017)

Dalam perjalanannya untuk mencapai dominasi energi untuk Amerika Serikat, Donald Trump telah menerapkan; Mencabut moratorium produksi energi di wilayah federal, mendukung proyek Keystone XI dan Dakota Pipeline, menarik diri dari *Paris Agreement*, Menghilangkan aturan-aturan yang memberatkan bagi produksi energi, menghapus pertimbangan gas rumah kaca dari tinjauan izin di bawah Undang-Undang Kebijakan Lingkungan dan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan *America First* dan mengabaikan agenda untuk menyelamatkan iklim. (Stansberry, 2018)

Dengan berjalannya kebijakan AFEP, pertumbuhan produksi dan konsumsi energi fosil Amerika Serikat terlihat jelas mengalami peningkatan pada tahun 2017 - 2019. Hal ini dapat dilihat melalui data yang dilansir dari *U.S Energy Information Administration*:

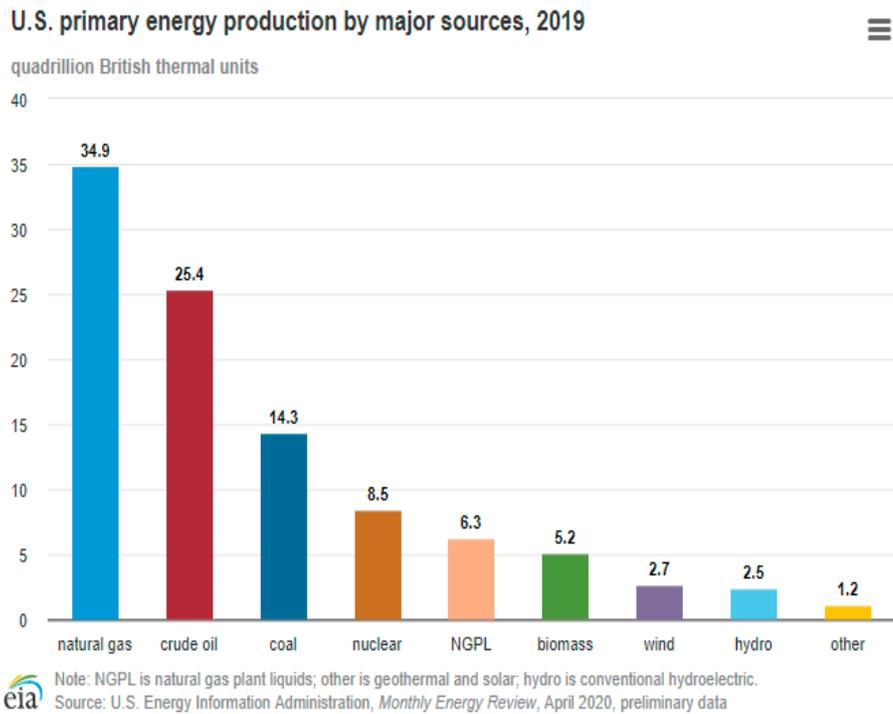
(Statista, 2021)



Grafik 1.1 Tingkat Pertumbuhan Produksi Energi Amerika Serikat

Dan energi yang paling banyak digunakan adalah gas alam, minyak bumi, dan batu bara:

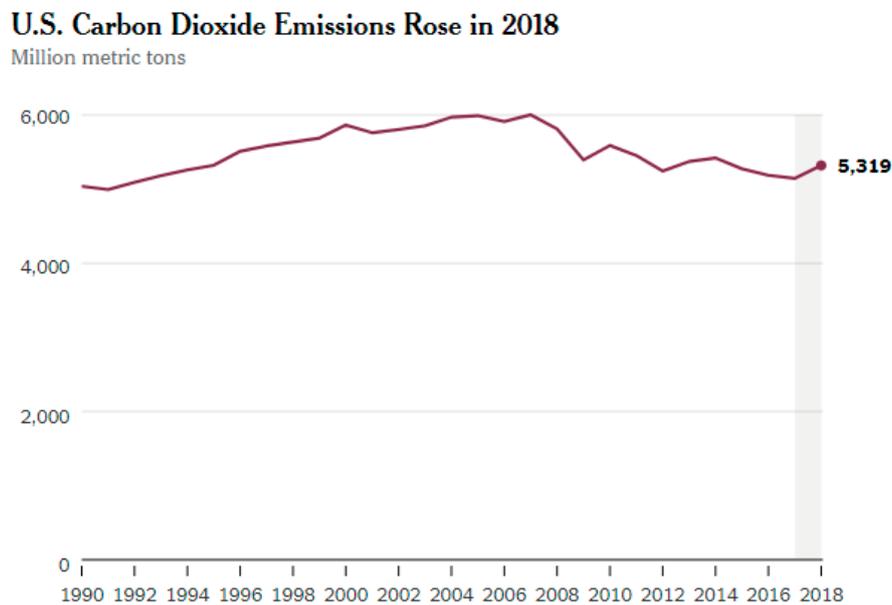
(eia, U.S. energy facts explained, 2021)



Grafik 1.2 Tingkat Jenis Produksi Energi Amerika Serikat

Diikuti dengan peningkatan emisi gas karbon dioksida Amerika Serikat:

(Plumer, 2021)



Grafik 1.3 Tingkat Peningkatan Gas Karbondioksida Amerika Serikat

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat pada masa pemerintahan Donald Trump Amerika Serikat mengalami peningkatan pembuangan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat dilihat mulai dari tahun 2016 dimana berakhirnya masa kepemimpinan Obama, hingga tahun-tahun seterusnya yang dipimpin Donald Trump sampai 2018. Berdasarkan data The New York Times Amerika Serikat mengalami peningkatan emisi gas rumah kaca dari 5.131 t pada tahun 2016 ke 5.319 t pada tahun 2018. Tentu saja hal ini juga diikuti dengan produksi energi fosil Amerika Serikat yang meningkat seperti data yang ditunjukkan oleh *eia U.S Energy Information Administration*.

Pemerintahan Trump dikenal berkaitan erat dengan industri bahan bakar fosil, industri bahan bakar fosil memiliki pengaruh yang besar atas pemerintahan Donald Trump dan Partai Republik. Mulai dari Wakil Presiden Amerika Serikat yaitu Mike Pence, dan Administrator EPA (*Environment Protection Agency*) Amerika Serikat, Scott Pruitt secara pribadi berkaitan

dengan *Koch Industries* (Mayer, 2017) dan pada 25 Mei 2017 dua puluh dua senator dari Partai Republik menulis surat kepada presiden, yang mendesaknya untuk segera keluar dari *Paris Agreement*, dikabarkan bahwa ke 22 senator ini telah mengumpulkan lebih dari 10 juta USD dari minyak, gas, dan batu bara. Setelah Amerika Serikat mundur dari *Paris Agreement*, administrasi Trump akan berusaha mencabut peraturan iklim yang membahayakan perusahaan energi termasuk *Koch Industries*, (Tom McCarty, 2017). Hal ini membuktikan bahwa peran penting bagi aktor domestik dan melihat kelompok kepentingan legislatif dalam membatasi dan mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri presiden (Afrimadona, 2019).

Hal ini menggambarkan situasi domestik di Amerika Serikat dapat mempengaruhi politik luar negerinya. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan *America First Energy Plan* terkait isu perubahan iklim di masa pemerintahan Donald Trump.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan Amerika Serikat yang berkaitan dengan energi dan perubahan iklim sehingga menyebabkan keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement*. Kebijakan tersebut merupakan ambisi Donald Trump untuk dominasi energi yang disebut dengan AFEP (*America First Energy Plan*).

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat ditarik Rumusan masalah berupa, “Bagaimana implementasi kebijakan AFEP (*America First Energy Plan*) terkait perubahan iklim pada masa pemerintahan Donald Trump?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis jabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan *America First Energy Plan* terkait isu perubahan iklim pada masa pemerintahan Donald Trump.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat – manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Secara akademik, manfaat penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi dan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta untuk mencari perbedaan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan dan berkontribusi bagi ilmu Hubungan Internasional.
2. Secara praktis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan kerangka berpikir untuk teman-teman yang ingin meneliti tema yang sama tetapi menggunakan konsep yang berbeda.

1.5 Sistematika Penulisan

A. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, membandingkan penelitian ini dengan penelitian–penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, alur pemikiran dan argumen utama.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian beserta sumber data yang penulis gunakan dan menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan waktu dan lokasi penelitian.

D. BAB IV REZIM IKLIM INTERNASIONAL DAN KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT DI BAWAH KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP

Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana tindakan Amerika Serikat dalam rezim iklim internasional. Dimana dua Presiden Amerika Serikat memiliki respon yang berbeda-beda terhadap isu perubahan iklim.

E. BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AMERICA FIRST ENERGY PLAN DAN TEORI IMPLEMENTASI GEORGE C. EDWARD

Pada bab v penulis akan menjabarkan implementasi AFEP (*America First Energy Plan*) secara komprehensif dan ditinjau berdasarkan teori implementasi George C. Edward.

F. BAB VI PENUTUP

Bab VI berisikan mengenai kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, beserta saran yang penulis berikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Penelitian ini penulis sertakan dengan penelitian terdahulu yang didapatkan dari mengambil beberapa sumber, karya ilmiah, dan literatur yang membahas permasalahan yang serupa. Namun tentunya dengan proses